

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**  
**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas izin-Nya Rencana Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat disusun dengan baik.


Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86/SE/2020 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/SE/2021 tentang Pedoman Input Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023, dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 78 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Povinsi DKI Jakarta tahun 2023. Secara substansi, Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 memuat hasil evaluasi Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyesuaian dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Jakarta, Juli 2022

Kepala Dinas  
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

  
Heru Hermawanto  
NIP. 196803121998031010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Executive Summary	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>24</b>
3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	24
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	24
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	25
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	26
3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>28</b>
4.1. Program	28
4.2. Rencana Kerja	28
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>36</b>

## EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 untuk menjabarkan Renstra SKPD ke dalam rencana operasional tahunan sebagai acuan/pedoman bagi aparatur dan alat ukur kinerja.

Ada 4 (empat) Program yang dijalankan DCKTRP yang terdiri dari 3 (tiga) Program Prioritas sebagai Perangkat Daerah pelaksana urusan Penataan Ruang dan Pertanahan dan (satu) Program pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2022. Realisasi capaian pelaksanaan 2 (dua) Program Prioritas pada tahun 2021 melampaui target yang sudah ditetapkan. Namun demikian permasalahan dan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DCKTRP, seperti konflik kebutuhan ruang, pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, integrasi penataan ruang dan penataan pertanahan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan konstruksi bangunan Gedung pemerintah yang masih perlu upaya untuk diselesaikan disamping adanya kebijakan atau peraturan baru yang terkait tata ruang yang harus dapat diantisipasi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2023 disusun bukan hanya untuk menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kinerja pelayanan DCKTRP melainkan juga diharapkan dapat untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada.

# PENDAHULUAN



## Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan

### 1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rancangan akhir perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2023 dalam Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
31. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
33. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
34. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
35. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
36. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
37. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan;
38. Peraturan Gubernur Nomor 403 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan;
39. Keputusan Gubernur Nomor 599 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1592 Tahun 2019 tentang Standarisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

41. Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
42. Keputusan Gubernur Nomor 1645 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
43. Instruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

Tema pembangunan pada tahun 2023 adalah "Akselerasi Keunggulan Jakarta untuk Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif, dan Berkeadilan", memenuhi money follow priority programs, memenuhi agenda Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, dan mengakomodir aspirasi masyarakat semaksimal mungkin dalam rangka mencapai target Rancangan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rancangan Akhir Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

#### BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (n-1); analisis kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.



**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini berisi Rencana kerja dan pendanaan daerah serta program dan kegiatan Dinas dan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan pada Tahun 2021. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan Sub Kegiatan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta realisasi target sasaran Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan pada Tahun 2021. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2022.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Terdapat 2 (dua) program utama di Tahun 2021 yang diampu oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung. Selain itu terdapat 1 (satu) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dari (tiga) program yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, realisasi capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terdiri dari 2 (dua) indikator program capaiannya melebihi target. Demikian juga dengan realisasi capaian Program Penataan Bangunan Gedung yang terdiri dari 1 (satu) indikator program capaiannya melebihi target. Ada 1 (satu) Program yang realisasi capaiannya sesuai dengan targetnya yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) indikator.

Gambaran realisasi capaian setiap Program terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Kesesuaian rencana tata ruang	Rencana adalah ketentuan zonasi (sub zona, intensitas dan kegiatan) pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Implementasi rencana adalah kondisi eksisting pemanfaatan ruang di lapangan. Cara perhitungan : ((luas Sub Zona rencana - luas implementasi kegiatan/sub zona yang tidak sesuai) / Luas sub Zona Rencana) x 100%	61%	72%	118,02%	Melebihi Target
		Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	Pelanggaran tata ruang yang ditangani meliputi: Penyelenggaraan bangunan gedung melalui tindakan Surat Peringatan (SP) dan Penyegehan. Cara perhitungan : (Jumlah Tindakan penyegehan / Jumlah Surat Peringatan ) X 100%	90%	99%	110,24%	Melebihi Target
2.	Penataan Bangunan Gedung	Persentase pembangunan gedung pmda yang memenuhi standar	Gedung pmda standar adalah Bangunan Gedung berumur sampai dengan 25 tahun yang secara Struktur dan ME (mekanikal & elektrik) masih berfungsi baik yang dikelompokkan menjadi : (a) bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai; dan (b) bangunan gedung tidak sederhana bertingkat lebih dari 4 lantai.	58,00%	58,76%	101,31%	Melebihi Target
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	Tercapai

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			program pada monev. Index 1 = 0 -25 %, Index 2 = >25 % - 50 %, Index 3 = >50 % - 75 %, dan Index 4 = >75 % - 100 %				
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Index 1 = 0 -25 %, Index 2 = >25 % - 50 %, Index 3 = >50 % - 75 %, dan Index 4 = >75 % - 100 %	4 Indeks	4 Indeks	100%	Tercapai

Sedangkan rincian hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan sampai dengan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut dapat dilihat realisasi dan capaian masing-masing Sub Kegiatan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan pada Tahun 2021 dan proyeksi realisasi dan capaian masing-masing Sub Kegiatan Tahun 2021. Secara umum capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021 tercapai 100 %.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
s.d. Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
										Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DCKTRP	A	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	A	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	A	1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	90,00%	94,93%	90%	99%	110,24%	90,00%	94,72%	105,24%
	A	1	3	12	01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		42 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	1	3	12	01.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administrasi dan hukum								
	A	1	3	12	01.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Monitoring terhadap Tata Ruang dan Bangunan di Kepulauan Seribu					18 Kunjungan			
	A	1	3	12	01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%			
	A	1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Konten/ Fitur Sistem Informasi Tata Ruang yang Berkembang		5 Sistem Informasi	1 Konten/ Fitur Aplikasi	1 Konten/ Fitur Aplikasi	100%			
		1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Peta yang dibuat/dimutakhirkan			2 Peta	2 Peta	100%	4 Peta		
	A	1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah lembar arsip yang sudah didigitalisasi		42229 lembar						
	A	1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah software yang diupgrade atau diperpanjang lisensinya		16 Unit	1 Software	1 Software	100%			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung pengukuran, pemetaan, dan pertanahan yang tersedia			7 Jenis	7 Jenis	100%	9 Unit		
	A	1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Nilai kepuasan pelayanan jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan		4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	100%	4 Nilai		
	A	1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	62,00%	71,62%	61%	72%	118,02%	62,00%	68,54%	115,52%
	A	1	3	12	01.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase penyelenggaraan penataan ruang		100%	100%	100%	100%	100%		
	A	1	3	12	01.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen bahan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang		1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	A	1	3	12	01.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen ketentuan/perencanaan penataan ruang yang tersedia		6 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	100% 100% 100%	11 Dokumen		



Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
										Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	100,00%	58,65%	58,00%	58,76%	101,31%	100,00%	72,47%	100,00%
	A	1	3	8	01.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan bangunan Gedung Pemerintah Daerah		58,65%	100%	100%	100%	100,00%		
	A	1	3	8	01.01	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan perencanaan bangunan gedung pemda yang tersusun		58 Dokumen	1 Bangunan 15 Dokumen	1 Bangunan 15 Dokumen	100% 100% 100%	63 Dokumen		
	A	1	3	8	01.01	2 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung pemda yang terpelihara/terawat		1 Bangunan	3 Dokumen	3 Dokumen	100% 100%	3 Bangunan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	1	3	8	01.01	8	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Pengawasan Ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Provinsi DKI Jakarta			1 Laporan	1 Laporan	100%	200 Orang		
	A	X														
	A	X	XX													
	A	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	4 Indeks	4	4	100%			100,00%
	A	X	XX	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Jasa administrasi transaksi keuangan		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	
	A	X	XX	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100%		
	A	X	XX	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	X	XX	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kepuasan pelayanan pengadaan barang penunjang operasional kantor		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai	4	
	A	X	XX	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai kepuasan layanan listrik dan elektronik		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	indeks kepuasan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Pelayanan Dalam Penyediaan Makanan / Minuman		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah trip jasa transportasi laut pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai ke kepulauan Seribu		1				130 Trip		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	X	XX	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang operasional kantor/gedung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	A	X	XX	1	01.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan ketersediaan perlengkapan kerja pendukung operasional gedung/kantor		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai kepuasan pelayanan pengadaan barang penunjang operasional kantor		4 Nilai	4	4	100%	4	4	
	A	X	XX	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 Nilai	4	4	100%	100%		
	A	X	XX	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Dalam Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berupa Mesin Fotokopi		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	X	XX	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Dalam Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Meliputi Layanan Petugas Keamanan, Petugas Teknisi Mekanikal Elektrikal, Petugas Mesin Cetak Papan Segel dan Petugas Pengiriman		4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa sewa tempat yang tersedia						1 Paket/Tahun		
	A	X	XX	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan/perawatan barang milik daerah penunjang operasional kantor/gedung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	A	X	XX	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan/perlengkapan kerja yang terpelihara		100%	100%	100%	100%	100%		
	A	X	XX	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan kebersihan gedung/kantor		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	X	XX	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung/kantor		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		
	A	X	XX	1	01.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase lift gedung yang terpelihara		100%	100%	100%	100%	100%		
	A	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	4 Indeks	4	4	100%			100,00%
	A	X	XX	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kepuasan pelayanan pengadaan barang penunjang operasional kantor		4 Nilai	4	4	100%			
	A	X	XX	1	01.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Bahan/Material Berupa BBM KDO / KDO Khusus		4 Nilai	4	4	100%	4 Nilai		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja PD tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
										Target Rencana Kerja PD tahun 2021	Realisasi Rencana Kerja PD tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	X	XX	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%			
	A	X	XX	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Nilai	4	4	100%	34 Unit 34 Unit 4 Nilai		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Sebagai pelaksana urusan Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan (DCKTRP) memiliki Indikator Kinerja Kunci yang juga indikator program utama yang dijalankan sebagai indikator kinerja pelayanan disamping Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang. Lingkup pelayanan Bidang Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh DCKTRP.

Indikator Kinerja Kunci yang merupakan indikator kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yakni rasio kesesuaian rencana tata ruang dan persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani sedangkan jenis pelayanan dasar SPM bidang Penataan Ruang yang dapat diselenggarakan, yaitu

1. Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi DKI Jakarta beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
2. Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang.

Indikator dari 2 jenis layanan dasar tersebut di atas adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi DKI Jakarta beserta rencana rincinya melalui peta digital dengan nilai pencapaian 100 (seratus) persen dan terlaksanakannya penanganan terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja dengan nilai pencapaian 100 (seratus) persen. Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang di digitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya. Peta digital dapat terdiri atas peta RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota dan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan, yang dibuat dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png. Peta digital harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 250.000 (RTRW Provinsi), 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang berupa tindakan awal yang ditanggapi untuk ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja. Gambaran Target dan Realisasi dari Indikator Kinerja Kunci ini dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini



Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2021

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11	-13
1	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi DKI Jakarta beserta rinciannya melalui peta digital	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	60%	61%	62%	71,62%	72%	71,62%	
2	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persentase Jumlah Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang.	Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	90%	90%	90%	94,93%	99%	90%	

# TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH



Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,  
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

## 3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Perumusan isu strategis bagi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selama lima tahun ke depan juga perlu didasari penelaahan Rencana Strategis dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan ini dapat terjadi karena penerapan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau melalui asas Urusan Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian dan Lembaga yang di dalam Renstranya memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, DKI Jakarta menjadi preseden mengenai pentingnya perencanaan berkaitan dengan tuntutan ketersediaan ruang yang tidak hanya mengacu pada ruang permukaan, tetapi juga hingga hingga pada bagian di atas permukaan berupa struktur layang (elevated) dan juga di bawah permukaan (sub-surface), dengan adanya pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang melibatkan eksplorasi di bawah permukaan tanah dan penggunaan ruang secara layang di atas permukaan tanah.

Adapun terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) program pada rencana strategis dari Kementerian ATR /BPN yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, yang terdiri dari 8 sasaran program dan 9 indikator kinerja program; serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terdiri dari 2 sasaran program dan 2 indikator Kinerja Program.

## 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Adapun Rencana Strategis DCKTRP ini akan berketerkaitan dan

berkesinambungan pada tahapan pembangunan ke-5 (lima) dari RPJPD DKI Jakarta, yaitu periode tahun 2023-2025.

Berdasarkan analisis pada penyusunan RPJPD tahap ke-5, proyeksi jumlah penduduk diperkirakan mencapai 11,1 juta sampai dengan 11,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 8 sampai dengan 8,9 persen dan PDRB per kapita Rp 315 juta sampai dengan Rp 380 juta per tahun. Pada periode ini, yang menjadi tema dari pembangunan DKI Jakarta adalah mewujudkan Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan & Berdaya Saing Global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat.

Adapun misi ke-4 dari tahapan pembangunan ke-5 RPJPD DKI Jakarta dinilai berkaitan erat dengan urusan DCKTRP yaitu "Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam". Adapun beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan tata ruang, pertanahan, dan bangunan gedung adalah:

1. Perwujudan kawasan TOD modern dengan fasilitas yg mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga kota secara efisien, efektif, dan mantap;
2. Pengembangan kawasan badan air kota yg terpadu dengan penataan ruang Jakarta; serta
3. Pengembangan hunian vertikal yg terintegrasi dgn tata ruang kota.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 1 tahun 2012 menjadi sebuah arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 2030 tersebut, terdapat visi pembangunan DKI Jakarta, yaitu:

*"Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera"*

Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang menjadi arah gerak pencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 2030 adalah sebagai berikut:

Misi:

1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi;
2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia;
3. Mengembangkan budaya berkotaan;
4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana;
5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan
6. Menyeraskan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Adapun tujuan, kebijakan, dan strategi pada Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang berkaitan erat dengan arahan RPJPD terdiri dari:

1. **Penciptaan ruang wilayah yg menyediakan kualitas kehidupan kota yg produktif & inovatif**, yang dapat diwujudkan melalui pengembangan pusat kegiatan, salah satunya melalui Kawasan TOD.

2. **Perwujudan kawasan budidaya yg optimal dengan arahan persebaran penduduk di kota/kabupaten administrasi**, terdiri dari:
  - a. Pengembangan kawasan terpadu multifungsi dan mengakomodasi seluruh strata masyarakat dalam 1 kawasan superblok;
  - b. Pengembangan kawasan peremajaan kota menjadi lebih vertikal, kompak, terkait langsung dgn system angkutan umum massal;
  - c. Pengembangan kawasan permukiman dgn akses pada angkutan umum massal.
3. **Perwujudan keterpaduan pemanfaatan & pengendalian di ruang darat, laut, dan udara dgn mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan**, melalui:
  - a. Pengembangan RTH untuk mencapai 30%;
  - b. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan konsep bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan *sustainable urban design*

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, dirumuskan dengan mempertimbangkan:

1. Hasil Identifikasi Permasalahan
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Telaah Renstra Kementerian ATR/BPN
4. Telaahan Rencana Jangka Panjang Daerah
5. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal untuk mendukung Kota Berorientasi Transit
2. Penerapan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas pada bangunan gedung milik pemerintah dan non pemerintah
3. Penyelesaian administrasi pertanahan

### 3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta ialah sebagai berikut. Sehingga tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026**

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
		INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	% Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Persentase	10%	10%	20%	40%
1.1	Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	% Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	Persentase	5%	10%	25%	35%
2	Perbaikan Kualitas Ruang Perkotaan Melalui Perwujudan Rencana Detail Tata Ruang	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan RDTR	Persentase	74%	75%	76%	77%
2.1	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase	74%	75%	76%	77%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	% Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung	Persentase	3%	5%	8%	10%
3.1	Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	% Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persentase	8%	9%	10%	11%
		% Bangunan gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	7,50%	8,50%	9,50%	10,50%

# RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

---



## Renja Perangkat Daerah

### 4.1 Program

Rancangan Akhir Renja 2023 ini menggunakan program-program yang terdapat di Renstra Perubahan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023-2026 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdiri dari 3 (tiga) program utama dan 1 (satu) program pendukung. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Penataan Bangunan Gedung
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Program Penatagunaan Tanah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

### 4.2 Rancangan Akhir Rencana Kerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi serta Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Tanah Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 berserta rencana pendanaannya terdapat dalam Tabel 4.1 yang menampilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

**Tabel 4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SUBKegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Rincian Tahun 2023			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Dana
A	1					Urusan Pemerintahan					
A	1	3				Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
A	1	3	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
A	1	3	1	01.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4	Indeks	APBD
A	1	3	1	01.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	547	Orang/Bulan	APBD
A	1	3	1	01.02	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DOKumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	8	Dokumen	APBD
A	1	3	1	01.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4	Indeks	APBD
A	1	3	1	01.06	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DKI Jakarta	1	Paket	APBD
A	1	3	1	01.06	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DKI Jakarta	12	Paket	APBD
A	1	3	1	01.06	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DKI Jakarta	7	Paket	APBD
A	1	3	1	01.06	7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	DKI Jakarta	6	Paket	APBD
A	1	3	1	01.06	8	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	14	Laporan	APBD
A	1	3	1	01.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	1	Laporan	APBD
A	1	3	1	01.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang efisien	DKI Jakarta	4	Indeks	APBD

A	1	3	1	01.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DKI Jakarta	4	Unit	APBD
A	1	3	1	01.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	APBD
A	1	3	1	01.08	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DKI Jakarta	13	Laporan	APBD
A	1	3	1	01.08	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DKI Jakarta	19	Laporan	APBD
A	1	3	1	01.08	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DKI Jakarta	13	Laporan	APBD
A	1	3	1	01.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	Laporan	APBD
A	1	3	1	01.09	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DKI Jakarta	131	Unit	APBD
A	1	3	1	01.09	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	DKI Jakarta	326	Unit	APBD
A	1	3	1	01.09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	DKI Jakarta	1	Unit	APBD
A	1	3	1	01.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DKI Jakarta	1	Unit	APBD
A	1	3	1	01.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DKI Jakarta	7	Unit	APBD
A	1	3	1	02.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	Indeks	APBD
A	1	3	1	02.08	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DKI Jakarta	12	Laporan	APBD
A	1	3	8			Program Penataan Bangunan Gedung		DKI Jakarta			APBD
A	1	3	8	01.01		Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase penetapan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	DKI Jakarta	100	%	APBD
A	1	3	8	01.01	1	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah	DKI Jakarta	11	Dokumen	APBD



A	1	3	8	01.01	2	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan STrategis Daerah Peovinsi	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai	DKI Jakarta	4	Unit	APBD
A	1	3	8	01.01	4	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Startegis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	DKI Jakarta	10	Dokumen	APBD
A	1	3	8	06.01	8	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggaran Bangunan Gedung dan Masyarakat	DKI Jakarta	120	Orang	APBD
A	1	3	8	02.01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian proses penyelenggaraan perizinan penertiban bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF)	DKI Jakarta	100	%	APBD
A	1	3	8	02.01	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penertiban Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, peran tim profesi ahli (TPA), pendataan bangunan Gedung serta implementasi SIMBG	DKI Jakarta	6000	Dokumen	APBD
A	1	3	12			Program Penyelenggaraan Pentaan Ruang		DKI Jakarta			APBD
A	1	3	12	01.01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Provinsi	Persentase dokumen/bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu	DKI Jakarta	100	%	APBD
A	1	3	12	01.01	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTR Provinsi	DKI Jakarta	2	Dokumen	APBD
A	1	3	12	01.01	3	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelakasanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	DKI Jakarta	12	Dokumen	APBD
A	1	3	12	01.01	4	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	DKI Jakarta	1	Dokumen	APBD
A	1	3	12	01.03		Kegiatan Koordinasi dan Slnkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Penambahan/Pemuktahiran Data di Dalam Sistem Informasi Penataan Ruan sebagai media koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	DKI Jakarta	25	%	APBD
A	1	3	12	01.03	2	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem informasi penataan ruang	DKI Jakarta	12	Dokumen	APBD
A	1	3	12	01.04		Kegiatan Koordinasi dan Slnkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	DKI Jakarta	100	%	APBD

A	1	3	12	01.04	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	DKI Jakarta	57	Dokumen	APBD
A	2					Urusan Pemerintahan		DKI Jakarta			APBD
A	2	10				Bidang Urusan Pertanahan		DKI Jakarta			APBD
A	2	10	10			Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang terdata dan terverifikasi untuk perencanaan dan layanan				APBD
A	2	10	10	01.01		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bidang Tanah Milik Masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung sertifikasi di kawasan pemukiman	DKI Jakarta	700	Bidang tanah	APBD
A	2	10	10	01.01	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Provinsi	DKI Jakarta	1	Laporan	APBD

# PENUTUP

## Penutup Dokumen Renja

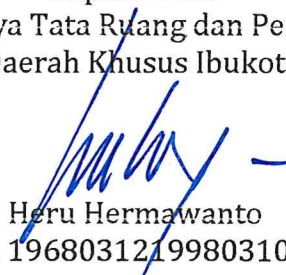


Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 2023 merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode tahun 2023. Rancangan Akhir Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023-2026. Fungsi Rancangan Akhir Renja 2023 adalah sebagai rancangan akhir pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 akan dijabarkan ke dalam Rancangan Renja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023.

Jakarta, Juli 2022

Kepala Dinas  
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

  
Heru Hermawanto  
NIP. 196803121998031010